

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penciptaan Karya

Anak merupakan anggota masyarakat yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Pertumbuhan setiap anak secara baik dapat memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan sekitar. Mulia (2014) jika setiap anak mengalami berbagai hambatan dalam masa pertumbuhannya akan menjadi permasalahan bagi sekitar dan bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak mempunyai hak dan kewajiban selama masa pertumbuhan mereka, agar dapat berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Keluarga, kerabat, masyarakat, serta pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Dalam hal ini, tujuan dari pasal tersebut sangat jelas bagaimana setiap keluarga dan sekitar, dapat menjadi peran utama untuk menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik selama kehidupannya. Pemerintah juga dituntut agar dapat merealisasikan setiap wewenang yang tertera pada pasal tersebut dengan baik secara transparansi. Pemerintah berperan untuk menyikapi beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya kesejahteraan seorang anak, sehingga pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada setiap keluarga untuk mengantisipasi terancamnya kehilangan hak asuh anak. Seperti penyediaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial bagi anak-anak yang beresiko kehilangan pengasuhan maupun yang telah kehilangan pengasuhan (terlantar).

Namun, dalam kenyataannya terdapat anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi sulit atau terlantar, bahkan mengalami perlakuan salah dan tindak kekerasan. Kesejahteraan dan perlindungan anak telah diatur oleh berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang Undang Dasar 1945,

Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah.

Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia, yang rentan terhadap kasus anak terlantar yang berdampak besar terhadap kesejahteraan anak. Menurut laporan dari hasil pemutakhiran data PPKS dan PSPK pada tahun 2021 di Yogyakarta jumlah anak terlantar yang terdata ada 7902 jiwa dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yakni jumlahnya berubah menjadi 5200 jiwa akan tetapi pada tahun 2023 jumlah penurunannya tidak terlalu signifikan seperti pada tahun tahun sebelumnya yakni 5128 jiwa.



Gambar 1.1 Data Anak Terlantar

(Sumber: <https://dinasos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Laporan-Hasil-Pemutakhiran-Data-PPKS-PSKS-2023-fix.pdf>)

Berdasarkan data dari website Dinas Sosial Yogyakarta, faktor ekonomi menjadi suatu hal yang penting dan krusial di suatu rumah tangga. Faktor ekonomi dapat menjadi penyebab utama hilangnya hak asuh terhadap anak, dikarenakan kondisi keuangan yang tidak stabil dalam memberikan kebutuhan seorang anak. Pernyataan tersebut berkaitan dengan pendapat Adhania (2019), yang memaparkan pendapat bahwa salah satu penyebab anak terlantar berasal dari keluarga ekonomi rendah. Anak terlantar diartikan sebagai situasi di mana hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar terancam akibat beberapa faktor yang terjadi di suatu keluarga, sehingga sang anak tidak memperoleh pendidikan yang layak, serta tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut dapat terjadi akibat kelalaian, ketidakmengertian, ketidakmampuan, maupun kesengajaan (Suyanto, 2010).

Pola asuh orang tua terhadap anak merupakan sebuah aspek yang penting, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus. Reaksi pertama yang sering dialami orang tua ketika mengetahui bahwa anak mereka berkebutuhan khusus adalah rasa terkejut (Safitri, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dari anak berkebutuhan khusus lebih rentan terkena masalah kesehatan mental dan fisik, serta kualitas hidup yang tidak optimal. Orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus juga lebih sering mengalami stres saat menghadapi tantangan untuk memberikan binaan di masa pertumbuhan anak, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan mereka dalam memperjuangkan hak dan kewajiban anak. Menurut Sukmadi dkk. (2020), kualitas hidup berpengaruh langsung pada kesejahteraan psikologis orang tua, di mana pemikiran tentang masa depan anak sering menjadi sumber kecemasan yang signifikan.



J. 2 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Gambar

(Sumber: <https://dinasos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2024/09/LaporanHasilPemutakhiran-Data-PPKS-PSKS-2023.fix.pdf>)

Data terbaru dari pemutakhiran Dinas Sosial Yogyakarta pada Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) tahun 2023 di Yogyakarta mencatat 3.815 jiwa yang terdaftar dalam kategori ini, menunjukkan adanya tantangan besar dalam kesejahteraan dan stabilitas keluarga di masyarakat. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis umumnya ditandai oleh hubungan yang kurang harmonis antar anggota, terutama antara suami-istri dan orang tua dengan anak. Ketidakserasian ini dapat mengakibatkan fungsi dan tugas keluarga tidak berjalan dengan baik, yang pada gilirannya memperburuk situasi bagi anak-anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Hal ini semakin

meningkatkan risiko kehilangan hak-hak mereka, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih serius dari berbagai pihak.

SOS Children's Villages muncul sebagai model alternatif yang memberikan dampak signifikan. Sebagai organisasi sosial nirlaba nonpemerintah yang aktif mendukung hak-hak anak, *SOS Children's Villages* bersungguh-sungguh untuk menyediakan kebutuhan utama bagi setiap anak-anak yang berisiko kehilangan pengasuhan maupun yang telah kehilangan pengasuhan orang tua, yaitu dengan memberikan lingkungan keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang (Anggreni, 2023). Didirikan oleh Hermann Gmeiner, lembaga ini lahir dari kepedulian mendalam terhadap banyaknya anak terlantar yang kehilangan hak pengasuhan akibat Perang Dunia II (Fahreza, 2020).

Untuk kantor pusat dari *SOS Children's Villages* terletak di Strasbourg dan organisasi ini telah bekerja secara aktif di 135 negara dan mengasuh lebih dari 80.000 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia *SOS Children's Villages* pertama kali masuk pada tahun 1972 yang didirikan oleh Agus Prawoto seorang tentara yang sedang bertugas di Austria yang memiliki ketertarikan dengan program pengasuhan, lalu ia mendirikan village pertama di Lembang, Bandung pada tahun 1972 kemudian disusul di kotakota lainnya seperti Jakarta, Semarang, Bali, Flores dan Aceh.

SOS Children's Villages sendiri di Indonesia memiliki tiga program kerja yang diterapkan khusus kepada keluarga dan anak, pertama yaitu program Pengasuhan Berbasis Keluarga (FLC), *SOS Children's Villages* bersama program FLC, memberikan pengasuhan layaknya sebuah keluarga bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua. Mereka dirawat tinggal bersama ibu SOS, saudara kandung, dan anakanak lainnya. Sehingga, anak-anak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas hingga mereka siap hidup sendiri. Kedua ada Program Penguatan Keluarga (FSP), *SOS Children's Villages* bersama program FSC, memberikan dukungan kepada keluarga yang mengalami kesulitan. Dukungan berupa konseling, pelatihan keterampilan, dan program berbasis komunitas dilakukan untuk membantu keluarga mencapai kemandirian dan memberikan pengasuhan yang tepat bagi anak-anak mereka. Terakhir ada program Tanggap Darurat (ERP), *SOS Children's*

Villages bersama program ERP, menjadi garda terdepan untuk setiap anak dan keluarga ketika bencana terjadi, anak-anak merupakan kelompok yang paling terkena dampak, mulai dari kehilangan akses pendidikan, kehilangan keluarga, hingga meninggalkan trauma mendalam. SOS Children's Villages Indonesia bekerja untuk memastikan setiap anak yang terdampak bencana tetap mendapatkan hak-haknya serta terlepas dari trauma bencana melalui program bantuan langsung dan pendirian children center yang memfasilitasi semua kegiatan anak termasuk pendidikan, bermain, serta trauma healing.

Di Yogyakarta sendiri, beberapa program yang diterapkan sedikit berbeda dengan beberapa program *SOS Children's Villages* pada cabang lainnya yang ada di Indonesia. *SOS Children's Yogyakarta* lebih fokus menerapkan Program Penguatan Keluarga (FSP) sebagai program unggulan mereka, hal tersebut dikarenakan seluruh tim *SOS Children's Yogyakarta* meyakini bahwa faktor utama yang terjadi pada setiap permasalahan anak adalah orang tua. Oleh sebab itu, *SOS Children's Yogyakarta* berkomitmen untuk membina dan memberikan penerapan kembali kepada setiap keluarga yang berdampak bermasalah psikologis. Hal tersebut dilakukan agar seluruh orang tua dapat mempertimbangkan kembali keputusan krusial yang akan mereka ambil, karena berisiko terhadap hilangnya pengasuhan terhadap anak. Dengan komitmen seperti ini, *SOS Children's Yogyakarta* meyakini bahwa cara tersebut efektif untuk mencegah meningkatnya angka anak terlantar di Yogyakarta, karena pada hakikatnya tempat pulang terbaik dan nyaman seorang anak, adalah orang tuanya sendiri. Sehingga, orang tua yang mengalami permasalahan terhadap hak asuh anak harus segera diberikan penanganan lebih lanjut dan diberikan binaan kembali, guna untuk keberlangsungan pengasuhan sang anak dan kerhamonisan keluarga. Namun, di Yogyakarta sendiri *SOS Children's Villages* tetap memberikan rumah untuk perlindungan anak yang telah kehilangan pengasuhan, di mana rumah tersebut terdiri dari seorang Ibu pengasuh dan Kakak. Sebagai konsep mereka yang tidak ingin di rumah tersebut semua anak seumuran, tetapi dalam bentuk keluarga mulai dari tua hingga yang muda. Hanya saja, rumah perlindungan tersebut tidak sebanyak dan sebesar di kota

lainnya, mengingat program yang mereka utamakan adalah program penguatan keluarga.

Menanggapi permasalahan yang terjadi pada hak asuh anak tersebut, film dokumenter nonfiksi sebagaimana dijelaskan oleh Fachruddin (2012) dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program ini. Film nonfiksi umumnya memanfaatkan rekaman aktual, termasuk perekaman langsung dari kejadian, wawancara, dan data statistik yang relevan, yang berfungsi untuk memperkuat narasi serta menguraikan dampak dari berbagai isu sosial, seperti penelantaran anak dan keluarga bermasalah. Dengan menyajikan isu ini dari sudut pandang tertentu, film dokumenter mampu menarik perhatian masyarakat terhadap pentingnya program penguatan keluarga dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan Dinas Sosial, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi anak-anak. Melalui pendekatan ini, penguatan keluarga tidak hanya memberdayakan orang tua/wali, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta pencegahan penelantaran, menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga di Indonesia.

Film merupakan sarana penyampaian pesan yang baik dan efektif, menurut Sobur (2013) film selalu mempengaruhi dan membentuk khalayak berdasarkan muatan pesan di dalamnya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Oleh sebab itu film dinilai sebagai salah satu sarana penyampaian pesan yang efektif. Tujuan diciptakannya Film dokumenter Tangguh atau Runtuh memiliki potensi besar untuk menyampaikan pesan-pesan melalui visual yang berkaitan dengan hak-hak dan kesejahteraan anak. Sehingga, pesan tersebut dapat memberikan kesadaran kepada keluarga dan khalayak untuk lebih peduli dengan kondisi anak-anak. Menurut Aufderheide (2007) film dokumenter berbeda dengan film fiksi karena memiliki landasan faktual dan memiliki klaim atas kebenaran realita yang diungkapkan. Melalui film dokumenter tersebut, tujuan yang diinginkan penulis sebagai sutradara akan tersampaikan dengan baik dan efektif dalam menyampaikan isu

kesejahteraan anak tersebut, karena dokumenter yang diproduksi didukung dengan data statistik yang relevan saat sutradara melakukan riset pada pra produksi. Sehingga, dengan karya film dokumenter Tangguh atau Runtuh, sutradara berharap pemerintah, keluarga dan masyarakat sekitar agar dapat lebih peka dan sadar atas permasalahan yang terjadi terhadap hak asuh dan kesejahteraan anak. Karena pada intinya, pengemasan film ini tidak hanya ditujukan kepada satu segmen saja, melainkan kepada seluruh audiens baik yang sudah menjadi orang tua maupun yang belum, agar dapat lebih mengerti terhadap konsekuensi rasa tanggung jawab dalam memiliki maupun mengasuh anak, serta berperan penting bagi setiap anak yang membutuhkan pengasuhan secara baik di masa pertumbuhannya.

Dalam sebuah produksi film dokumenter, peran sutradara sangat penting dan krusial dalam menentukan alur cerita yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Mulai dari pra produksi hingga pasca produksi, sutradara memiliki andil dalam mengemas cerita yang akan divisualkan, hingga nantinya film tersebut di distribusikan. Pada film dokumenter sendiri, seorang sutradara harus mempunyai visi kreatif dari sebuah film tersebut yang berbeda dengan film fiksi. Pada film non-fiksi atau film dokumenter, seorang sutradara harus melakukan riset secara detail terkait subjek dan objek yang akan dikemas menjadi sebuah cerita, riset tersebut berdasarkan data dan fakta sebagaimana kejadian tersebut terjadi secara nyata. Menurut Suyanto (2020) seorang sutradara film mengendalikan aspek artistik dan dramatis sebuah film dan memvisualisasikan skenario tersebut, sambil memandu kru teknis dan aktor dalam pemenuhan visi itu. Selain fokus dan bertanggung jawab terhadap *storyboard*, *framing*, *storyline*, dan lainnya, Seorang sutradara juga harus bekerjasama dengan sinematographer untuk mewujudkan visual yang diinginkan dari alur film yang telah direncanakan dengan matang.

Dalam film dokumenter Tangguh atau Runtuh yang bertemakan kemanusiaan, film dokumenter ini membahas tentang sebuah organisasi yang menyuarakan pentingnya hak dan kewajiban anak yang harus diwujudkan, karena maraknya kasus anak yang terlantar akibat terancam hilangnya hak asuh pada anak tersebut. Sutradara berupaya untuk

membangun narasi secara terstruktur, alur cerita dikemas secara dramatisasi untuk mendapatkan simpati dan emosional pada isu yang dibahas. Alur cerita dan teknik pengambilan gambar yang diterapkan telah dibedah secara matang, mengingat isu yang diangkat terbilang sensitif di tengah-tengah maraknya isu eksploitasi anak, agar tidak menimbulkan prasangka buruk dari khalayak. Pada pra produksi film dokumenter *Tangguh* atau *Runtuh*, sutradara tidak hanya bertanggung jawab terhadap alur cerita dan kinerja antar tim, melainkan bertanggung jawab terhadap pendekatan kepada subjek atau narasumber yang akan divisualkan pada film tersebut. Pendekatan kepada subjek dan narasumber dalam film dokumenter sangat penting sekali, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi data dan peristiwa yang sebenarnya. Pendekatan dan observasi pada film *Tangguh* atau *Runtuh* dilakukan selama empat sampai lima kali pertemuan dengan subjek utama, narasumber dan beberapa pihak yang terlibat.

Pada *Documentary Participatory* *Tangguh* atau *Runtuh*, sutradara menerapkan gaya pendekatan secara partisipatif kepada pihak yang terlibat di visual mereka. Pendekatan partisipatif dilakukan bertujuan untuk memudahkan sutradara terlibat secara mendalam untuk menggali informasi dari permasalahan yang dialami oleh subjek. Bill Nichols dalam *Introduction to Documentary* (2001) menjelaskan bahwa dalam dokumenter *participatory*, pembuat film berinteraksi langsung dengan subjek dan aktif membentuk narasi, dengan kehadiran mereka menjadi bagian integral dari proses dokumentasi. Tanpa adanya pendekatan secara mendalam oleh sutradara kepada subjek yang akan divisualkan, akan membuat film tersebut tidak tersampaikan secara detail, karena masih ada beberapa fakta yang belum terungkap dari isu yang akan ditonjolkan. Nichols juga mencatat bahwa pembuat film tidak selalu harus muncul di depan kamera; interaksi mereka dengan subjek melalui pertanyaan atau arahan tetap menjadi kunci utama dalam genre ini. Pandangan ini sejalan dengan Michael Renov dalam *The Subject of Documentary* (2004), yang menambahkan bahwa meskipun pembuat film dapat terlibat aktif dalam proses naratif, mereka tidak harus tampil dalam frame. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dan isu yang ditonjolkan sangat sensitif,

karena berkaitan dengan kemanusiaan dan kesejahteraan anak dalam memenuhi haknya, maka penulis sebagai sutradara harus bisa mengambil peran sebaik mungkin dalam melakukan pendekatan kepada narasumber yang terlibat, karena tanpa adanya pendekatan secara mendalam dan baik, informasi dari isu yang diangkat tidak akan tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Eksplorasi Pendekatan Partisipatif Dalam Penyutradaraan Film Dokumenter Tangguh Atau Runtuh” sebagai tugas akhir.

1.2 Manfaat Penciptaan Karya

1.2.1 Manfaat Karya Secara Akademis

Menerapkan pengetahuan dan wawasan dari ilmu perkuliahan dalam produksi film memungkinkan penulis untuk dapat mengimplementasikan teori dan praktik, termasuk keterampilan dalam pembuatan skenario cerita, teknis saat produksi, penerapan sinematografi, penyuntingan film, dan manajemen produksi film dokumenter. Hal ini mendukung penciptaan audio visual yang berkualitas serta perencanaan yang efisien.

Di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya film dan penyiaran, pembuatan film dokumenter ini memberikan manfaat yang berarti. Selain meningkatkan keterampilan teknis dalam produksi, mahasiswa juga belajar cara menyampaikan isu-isu sosial secara efektif melalui media audio visual. Film dokumenter Tangguh atau Runtuh juga dapat berfungsi sebagai bahan ajar yang berharga dalam diskusi akademis tentang hak-hak anak dan pengasuhan alternatif.

1.2.2 Manfaat Karya Secara Praktis

Film dokumenter ini berfungsi sebagai alat advokasi yang ampuh untuk melindungi kesejahteraan anak. Dengan menampilkan kisah keluarga dampingan dari program penguatan keluarga yang diterapkan oleh *SOS Children's Villages* beserta program pengasuhan alternatif yang

ditujukan untuk anak-anak yang telah kehilangan hak asuh, film ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengasuhan yang layak serta mewujudkan hak-hak setiap anak.

Terdapat manfaat yang signifikan bagi penulis dalam produksi film dokumenter Tangguh atau Runtuh ini. Penulis mendapatkan wawasan serta pengetahuan yang bermanfaat selama proses riset pada pra produksi film dokumenter tersebut, mulai dari melakukan pendekatan kepada seluruh pihak yang terlibat, perencanaan produksi, pembuatan skenario produksi, hingga penyuntingan film dokumenter ketika pasca produksi. Pengalaman yang didapatkan selama proses produksi berlangsung sangat bermanfaat bagi penulis, untuk mengembangkan kembali ide-ide kreatif berikutnya serta meningkatkan pola komunikasi yang lebih baik. Terlepas dari hal tersebut, film dokumenter ini diharapkan berkontribusi besar sebagai ruang bagi seluruh masyarakat, tidak hanya pemerintah saja, untuk lebih peka dan aktif terhadap kepedulian pada kesejahteraan setiap anak di sekitar.